EVALUASI REFORMASI BIROKRASI (RB), SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DAN ZONA INTEGRITAS (ZI)

Hasil dan Strategi Percepatan Kedepan

PROF. ERWAN AGUS PURWANTO

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan

panrb

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

DASAR EVALUASI

Evaluasi Reformasi Birokrasi	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Evaluasi Zona Integritas WBK/WBBM
PERMENPANRB 26/2020	PERMENPANRB 12/2015	PERMENPANRB 10/2019

TUJUAN EVALUASI

ASSIST

Memberikan saran perbaikan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan zona integritas

ASSESS

Menilai perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan zona integritas

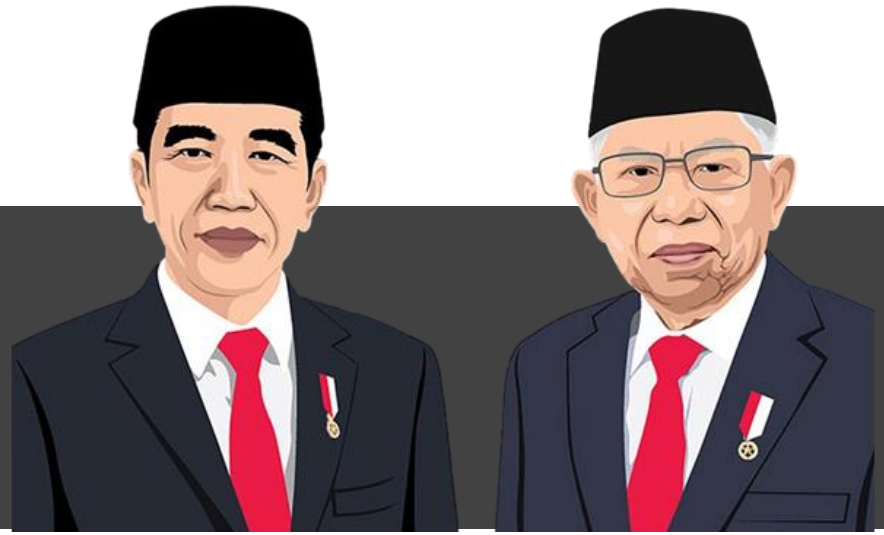

REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI *TOOLS* PERCEPATAN PRIORITAS KERJA PRESIDEN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL

VISI

Terwujudnya indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong rotong

MISI

1. Peningkatan kualitas manusia indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

PRIORITAS KERJA

1. PEMBANGUNAN SDM
2. MEMPERCEPAT DAN MELANJUTKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
3. UNDANG INVESTASI SELUAS LUASNYA UNTUK MEMBUKA LAPANGAN PEKERJAAN
4. **REFORMASI BIROKRASI**
5. **APBN YANG FOKUS DAN TEPAT SASARAN**

RB

- BIROKRASI YANG BERSIH & AKUNTABEL
- BIROKRASI YANG KAPABEL
- PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA

APA KATA PRESIDEN TENTANG REFORMASI BIROKRASI

“Kita harus menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran. setiap rupiah yang keluar dari APBN, semuanya harus kita pastikan memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat”

” Oleh sebab itu juga berulang kali saya juga mengingatkan ke semua pejabat negara, baik itu menteri, gubernur, bupati, dan wali kota, dan semua pejabat untuk hati-hati dalam menggunakan uang dari APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan APBN. Itu uang rakyat”

"Reformasi struktural sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi. **Regulasi yang rumit** dan menghambat kreativitas kerja harus dipangkas dan disederhanakan. **Kelembagaan pemerintahan yang gemuk**, tumpang tindih, dan tidak efisien harus segera diintegrasikan“

“Kompetensi SDM aparatur sipil negara… *mindset*-nya harus ***goal oriented***, berorientasi hasil, **adaptif** dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi... berpikir **kreatif** dan **inovatif** untuk memecahkan masalah dan memberikan **pelayanan terbaik** pada masyarakat"

REFORMASI BIROKRASI:
APA YANG SUDAH DIHASILKAN?

- **41.272 struktur** pada 91 K/L telah disedehanakan (8 Lembaga blm mengusulkan)
- **37 LNS telah dibubarkan** dan diintegrasikan pada K/L yang sesuai
- **82% Kementerian** telah memiliki tata kelola SPBE yang baik
- **45 Jabatan Fungsional baru** (berdasarkan keahlian), **124 usulan JF baru, terdapat total 245 JF 2020** sebagai tindak lanjut penyederhanaan birokrasi
- Sampai dengan tahun 2020, implementasi berhasil **mencegah potensi pemborosan APBN/APBD sebesar ±112 Triliun**
- Integrasi penyelenggaraan pelayanan publik melalui pembentukan **43 Mall Pelayanan Publik (MPP)** di daerah
- **Terbentuk 1598 unit percontohan pelayanan prima & anti korupsi,** termasuk pada sektor penegak hukum
- Program RB telah terkonsolidasi dalam kegiatan **STRANAS PK**

Hasil Reformasi Birokrasi Tahun 2020

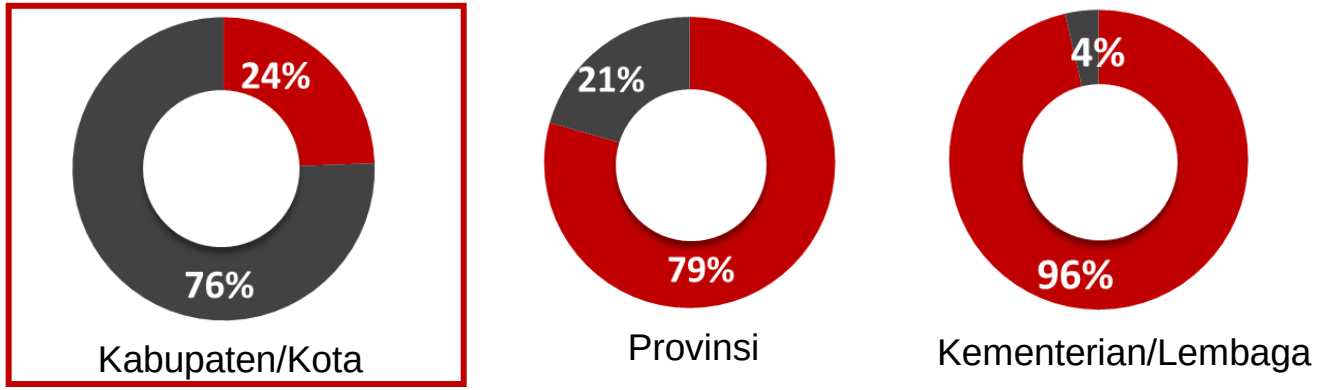

Instansi Pemerintah "Baik"

Instansi Pemerintah "Belum Baik"

Keterangan:

1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten/Kota masih rendah. Sebanyak **76%** Kabupaten/Kota memiliki indeks RB dibawah B (Baik)
2. Pada tahun 2020, sebanyak **109 Pemerintah Daerah** belum melaporkan hasil pelaksanaan RB nya kepada Kementerian PANRB.

BEBERAPA CATATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

1

RB BERSIFAT PROYEK/FORMALITAS DAN PEMENUHAN ADMINISTRATIF

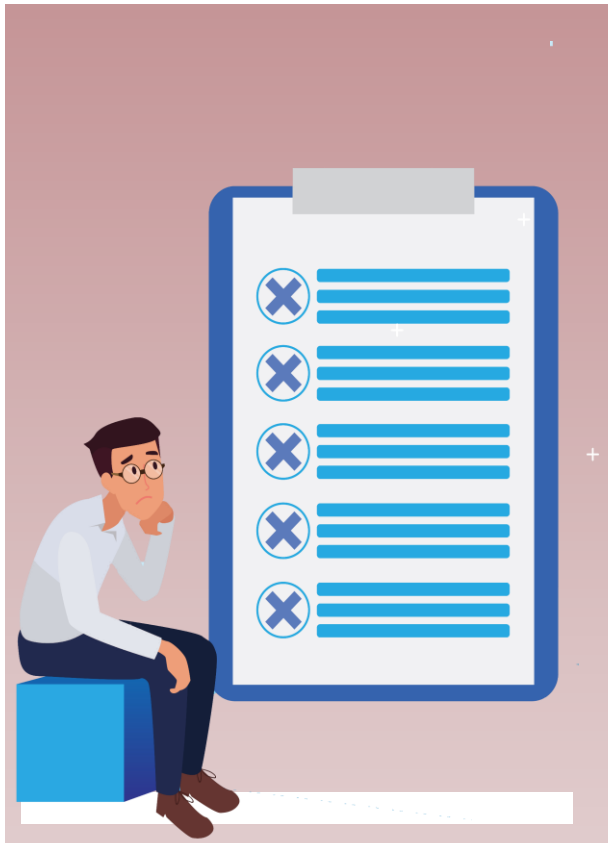

2

RB TIDAK MEMILIKI FOKUS DAN LOKUS PRIORITAS (BELUM MENGACU PADA AKAR MASALAH)

3

RB BELUM BERDAMPAK LANGSUNG PADA TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL

4

KOLABORASI ANTAR K/L YANG MENANGANI/MEMILIKI IRISAN DENGAN PELAKSANAAN RB BELUM TERBANGUN DENGAN BAIK

STRATEGI PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2021

MENYEMPURNAKAN ROADMAP RB NASIONAL

MENINGKATKAN KOLABORASI DALAM MENGAWAL PUSAT/DAERAH

MENINGKATKAN EFEKTIFITAS TIM ASISTENSI RB

MEMBERIKAN REWARD BAGI K/L/PD YANG MEMILIKI RB YANG TINGGI

MELAKUKAN EVALUASI BERSAMA PELAKSANAAN RB DENGAN KEDEPUTIAN LAIN (KEMENPANRB)

What's the Difference?

Roadmap 2019 - 2024

Penajaman Roadmap 2019 - 2024

3 sasaran dengan 8 area perubahan	**Fokus**	**RB General:** Perbaikan sistem & Fokus pada output utama yang berdampak pada *reform*. **RB Tematik:** Disesuaikan dengan isu prioritas presiden (Investasi & PEN) dan fokus pembangunan nasional; Fokus pada output utama yang berdampak langsung terhadap sasaran tematik
Instansi Pemerintah di Level Meso dan Mikro	**Lokus**	Instansi Pemerintah di Level Meso dan Mikro; Penekanan pada peran K/L yang memiliki kewenangan koordinasi RB
Penekanan pada pelaksanaan 8 area perubahan di Instansi Pemerintah	**Implementasi**	Penekanan lebih pada aspek **kolaborasi** & **integrasi** antar K/L/P, termasuk memperjelas peran masing - masing
PermenPANRB No 25 Tahun 2020	**Produk Hukum**	Perpres sehingga lebih mengikat

Capaian & Catatan Hasil Evaluasi SAKIP

- Semakin banyak Instansi Pemerintah yang telah menerapkan *money follow program, program follow result* secara baik melalui pengintegrasian perencanaan, penganggaran dan kinerja
- Semakin banyak Instansi Pemerintah yang melakukan Crosscutting program/kegiatan, sehingga tercipta sinergi dan kolaborasi
- Implementasi SAKIP sampai dengan tahun 2020 berhasil mencegah potensi pemborosan APBN/APBD sebesar ± 112 Triliun
- SAKIP mendorong Trilateral Kinerja (Kementerian PANRB, BAPPENAS, Kemenkeu) untuk pencegah penggunaan yang menyimpang dan tidak tepat sasaran

Hasil SAKIP Tahun 2020

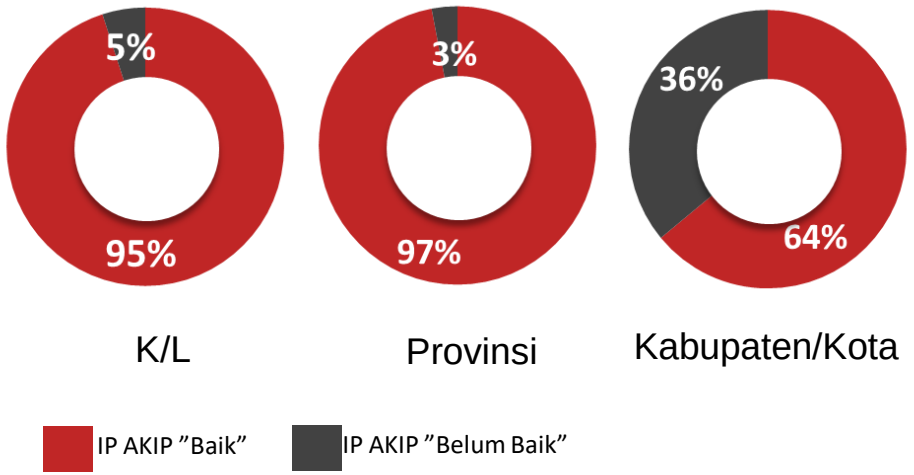

Catatan Evaluasi SAKIP

Komitmen perbaikan

1. Perbaikan hanya sekedar untuk nilai, sehingga dampak perubahan belum terasa
2. Keterlibatan pimpinan kurang intensif

Substansi

1. Sebagian besar penetapan sasaran strategis dan indikator pada level pemda sudah cukup baik, namun belum baik pada level OPD.
2. Perencanaan OPD masih *silo*. Belum terlihat integrasi dan kolaborasi antar OPD untuk mencapai sasaran Pemda *(sharing outcome)*
3. Cascading belum didasarkan pada *logical framework* yang baik
4. Definisi operasional indikator tidak mencerminkan relevansi terhadap sasaran.
5. Refocusing program/kegiatan bukan merupakan hasil dari menghapus program/kegiatan yang tidak efektif dan menguatkan program yang dianggap efektif.

STRATEGI PERCEPATAN IMPLEMENTASI SAKIP

Pelaksanaan Trilateral Meeting Kinerja

Mendorong penerapan E-Performance Budgeting

Asistensi dan Bimbingan Teknis pada Instansi Pemerintah (IP) prioritas target Tahun 2024

Fokus Perbaikan Pada Kawasan Super Prioritas Nasional (KSPN)

Kolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(SAKIP)

Fokus pada perbaikan manajemen kinerja dalam suatu **Intansi Pemerintah**. Mulai dari perencanaan, Perjanjian Kinerja, Pengkuran, Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi

Transisi

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH

(SAKP)

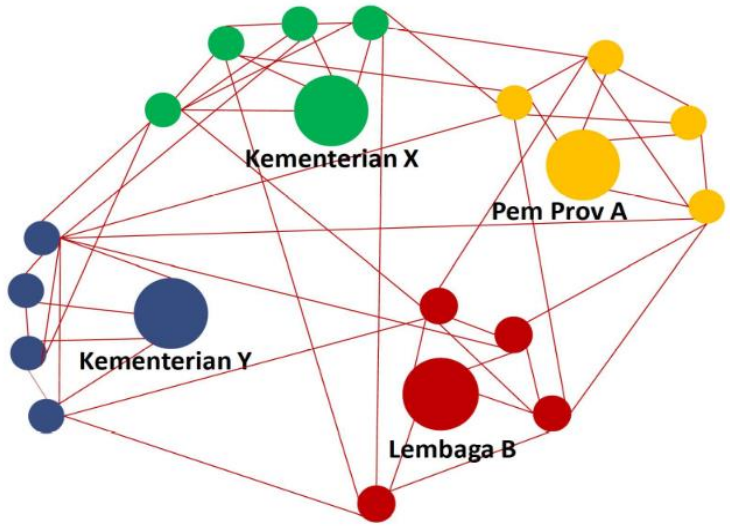

Menekankan pada aspek **kolaboratif dan sinergi** antara seluruh instansi Pemerintah (K/L/PD) dalam mencapai **kinerja Pemerintah**.

- Indikator kinerja pemerintah menjadi dasar bagi **pengorganisasian kerja lintas instansi pemerintah**
- Instansi-instansi bekerja secara gotong-royong (*Whole-of-government*) dalam sebuah *network governance*

Capaian Pembangunan Zona Integritas

Miniatur Implementasi RB pada Unit Kerja Strategis

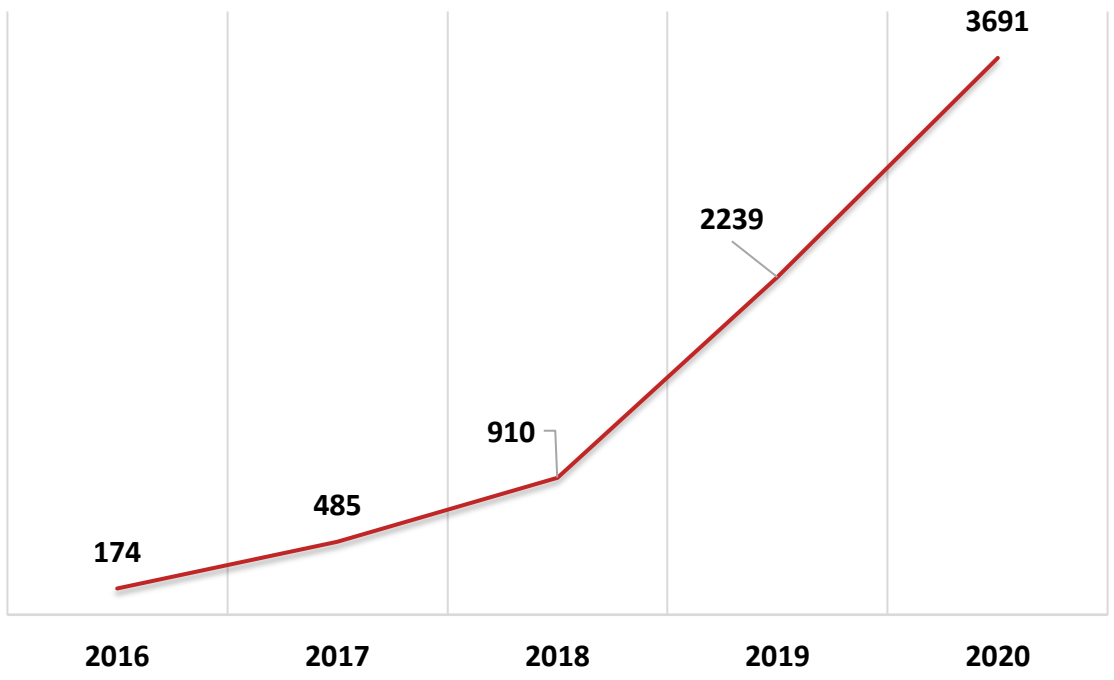

TAHUN	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL
Pengusulan	174	485	910	2.239	3.691	**7.583**
WBK	15	71	200	469	681	**1.459**
WBBM	2	6	5	34	82	**139**

- ✓ Pemberantasan calo di Kepolisian
- ✓ Digitalisasi pelayanan (Pembuatan SIM - STNK *online* dan keliling, *Electronic Traffic Law Enforcement*
- ✓ Pelayanan hingga malam
- ✓ Upaya pendekatan ke masyakarat

Kepolisian

- ✓ Aplikasi progres penanganan perkara CMS
- ✓ Bantuan hukum gratis kepada masyarakat & instansi lain
- ✓ Pendampingan hukum pada sektor strategis (Contoh: Dana Desa)
- ✓ Perlindungan saksi: rumah singgah saksi

Kejaksaan

- ✓ Kecepatan & kemudahan pelayanan paspor: paspor online & jemput bola
- ✓ Digitalisasi sistem pengawasan pada LAPAS

KEMENKUMHAM

- ✓ Transparansi penyelesaian perkara melalui sistem informasi
- ✓ Digitalisasi sistem kontrol hakim untuk menjaga integritas
- ✓ Integrasi data dengan instansi lain: Disdukcapil PA

MA

- ✓ Pencegahan calo di Disdukcapil
- ✓ Digitalisasi pelayanan Dukcapil online
- ✓ Kecepatan pelayanan 3 in 1, 1 jam selesai
- ✓ Pelayanan jemput bola
- ✓ Anjungan mandiri hingga level kecamatan & desa

DISDUKCAPIL

CATATAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

BUKAN UNIT STRATEGIS	KOMITMEN PIMPINAN RENDAH	KINERJA BELUM MENJADI DASAR	INOVASI BELUM SESUAI	*CONTINUOUS IMPROVEMENT* RENDAH
Unit kerja yang diusulkan bukan merupakan unit kerja strategis (**core business** dari suatu instansi pemerintah)	**Komitmen pimpinan** dalam pembangunan Zona Integritas suatu unit kerja masih rendah	**Kinerja** belum menjadi dasar pembangunan Zona Integritas.	**Inovasi** yang dibangun tidak sesuai/ berdampak langsung pada kinerja, penguatan integritas, maupun dan kemudahan pelayanan	Zona Integritas dipandang sebagai proyek semata untuk mendapatkan predikat, sehingga upaya ***continuous improvement*** masih rendah

Strategi Percepatan Pembangunan Zona Integritas

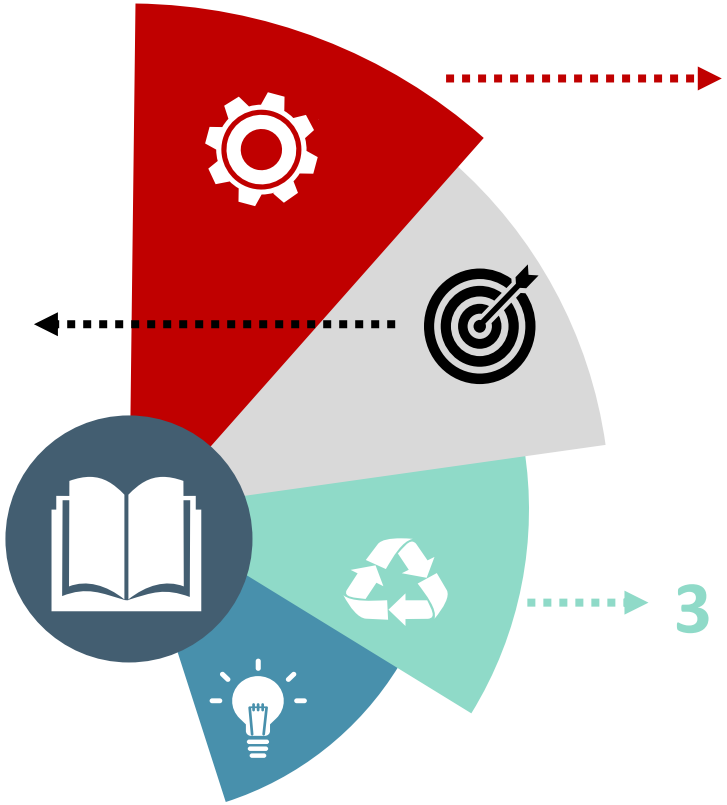

1

Penguatan peran TPI dalam mengawal & membangun unit percontohan secara mandiri

- Merumuskan mekanisme dan standard penetapan predikat WBK mandiri
- Monitoring hasil evaluasi TPI atas unit kerja yang telah memperoleh predikat WBK/WBBM

2

Mengubah Fokus Strategi Implementasi ke Kawasan Prioritas dan Stranas PK

- Fokus integrasi pembangunan ZI pada unit – unit kerja yang ada di Kawasan prioritas
- Pembangunan ZI tematik sesuai Stranas PK

3

Bersinergi dengan berbagai Unit dan Instansi lain

- Hasil evaluasi ZI akan divalidasi dengan hasil *mystery shopper*, serta *clearance* dari berbagai instansi seperti KPK, ORI, KY, Komolnas, Komjak, Bareskrim, dll.
- Bersinergi dengan Deputi Pelayanan Publik kaitannya dalam pelaksanaan survei pelayanan publik pada unit ZI

FOKUS EVALUASI RB SAKIP ZI

EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN

Efektivitas APBN/APBD pada sektor - sektor prioritas saat ini

Memastikan APBN/APBD efektif digunakan untuk program/kegiatan yang berdampak pada pencapaian sasaran prioritas saat ini, seperti pemulihan ekonomi dan kesehatan

Refocusing Program dan Kegiatan yang kurang berdampak menjadi lebih berdampak

Mengganti program/ kegiatan yang kurang berdampak menjadi program/ kegiatan yang berdampak langsung bagi masyarakat

PENYEDERHANAAN BIROKRASI

Penyederhanaan Struktur Organisasi

Memastikan upaya penyederhanaan/ perampingan struktur telah dilakukan; Memastikan bahwa struktur yang ada telah sesuai kebutuhan dan tetangan organisasi di masa mendatang

Tindak lanjut dari Penyederhanaan Birokrasi

Pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional, penyesuian penjabaran *(cascading)* kinerja dari level pimpinan hingga individu, penyesuaian mekanisme kerja dan proses bisnis.

INOVASI PELAYANAN DAN PENGUATAN INTEGRITAS SELAMA PANDEMI

Inovasi Pelayan Publik

Memastikan pelayanan tetap prima, mudah, cepat, tepat dan *delivered*, serta adaptif di segala kondisi, termasuk kondisi pandemi.

Inovasi dalam Penegakan Integritas

Menekan potensi penyalahgunaan integritas, seperti *fraud* dan KKN melalui penguatan *three lines of defense* pada instansi pemerintah dan pelibatan aktif masyarakat dalam mengontrol penyelenggaraan pemerintah

Inovasi dalam Tata Kelola SDM

Memastikan seluruh ASN tetap produktif dan berkinerja melalui penyesuaian mekanisme kerja yang jelas dan akuntabel

TERIMA KASIH

"Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah apapun"

-Ir. Soekarno-

@rbkunwas @rbkunwas @rbkunwas @rbkunwas rbkunwas.menpan.go.id